

## **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**WiwikNur Hidayah<sup>1</sup>, Maryono<sup>2</sup>, Batara Daniel Bagana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

e-mail :<sup>1</sup>wiwiknurhidayah36@gmail.com, <sup>2</sup>maryono@edu.unisbank.ac.id, <sup>3</sup>batara@edu.unisbank.ac.id

### **ABSTRACT**

*Capital expenditure has an important role because it has a long-term benefit to provide services to the public. So the central government should provide more activities or programs to the local government so that the program can prosper and advance the local government. This study aims to examine and analyze the effect of Local Generated Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Financing of Capital Expenditures in Regencies / Cities in Central Java Province in 2015-2017. The sample in this study covers all Regencies / cities in Central Java province during 2015-2017 as many as 105 data. The analysis tools used are normality test, classical assumption test, multiple linear regression test, and model test. The result showed that the Local Generated Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund and Financing has a significant positive impact on capital expenditure.*

**Keywords:** *Local Generated Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Financing and Capital Expenditure*

### **ABSTRAK**

Belanja Modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pembiayaan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Sampel pada penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah selamatahun 2015-2017sebanyak 105 data. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi dan Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

**Kata kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pembiayaan dan Belanja Modal

**PENDAHULUAN**

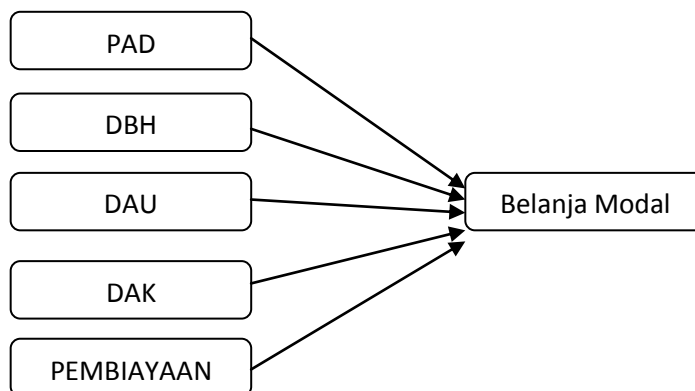
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam UU otonomi daerah no.22 tahun 1999 yang telah di ubah menjadi UU no. 32 Tahun 2004. Dalam pelaksanaanya otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki (Aditiya & Dirgantari, 2017).

Pada era otonomi daerah, termasuk didalamnya desentralisasi fiskal diharapkan untuk dapat terjadi peningkatan pada sektor publik. Dengan meningkatnya sektor publik akan menarik para investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Peningkatan pelayanan publik tidak lepas dari pengalokasian dari rencana APBD dimana termasuk anggaran modal belanja (Suhendra dkk, 2015). Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wandira, 2013). Selain PAD, yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Widiasih & Gayatri, 2017).Sedangkan menurut Kebijakan Umum APBD 2010, Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, ApakahPendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?

**Model Penelitian**



Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

H<sub>2</sub>: Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

H<sub>4</sub> : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

H<sub>5</sub> : Pembiayaan Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

**METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka, skor dan analisisnya menggunakan statistik Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, publikasi laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah yang memuat Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pembiayaan dan Belanja modal serta sumber data lainnya dari media perantara internet yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan beberapa sumber lain yang mendukung data penelitian.

Teknik pengujian analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, Uji multikolonieritas, Uji autokorelasi, dan Uji heteroskedastisitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda, uji koefisien determinan, uji parsial (uji t) dan uji F.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-69088269,391	25916589,510		-2,666	,009
1 PAD	,484	,053	,493	9,119	,000
DBH	1,032	,228	,207	4,520	,000
DAU	,135	,044	,193	3,043	,003
DAK	1,136	,297	,218	3,827	,000
Pembiayaan	,449	,053	,377	8,411	,000

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: data olahan SPSS

**Uji Regresi Linear Berganda**

Uji regresi berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BM = - 69088269,391 + 0,484 PAD + 1,032 DBH + 0,135 DAU + 1,136 DAK + 0,449 \text{ Pembiayaan} + e$$

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Hasil koefisien yang ditunjukkan pada Adjusted R Square sebesar 0,823 yang berarti 82,3% merupakan perubahan dari variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pembiayaan, sedangkan sisanya (100% - 82,3% = 17,7%) dapat dijelaskan di luar model tersebut.

**Pengujian Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Hasil pengujian simultan ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2179458167779356420,000	5	435891633555871170,000	97,676	,000 <sup>b</sup>
Residual	441800077582198720,000	99	4462627046284835,000		
Total	2621258245361554900,000	104			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL  
b. Predictors: (Constant), Pembiayaan, DAK, DBH, PAD, DAU

Sumber: data olahan SPSS

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 (<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

**Pengujian Parsial (Uji Statistik t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:171).

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa dari 5 variabel yang dimasukkan dalam tabel regresi, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

dan Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan untuk PAD sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ), DBH sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ), DAU sebesar 0,003 ( $p < 0,05$ ), DAK sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ), dan pembiayaan sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Hasil Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menjelaskan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila pemerintah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus menggali PAD sebesar-besarnya (Widiasih dan Gayatri, 2017). Memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah, sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Sugiarti dan Supadmi (2014), Purbarini dan Masdjojo (2015), Arifin dkk (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Aditya dan Dirgantari (2017), Azhar dan Hermanto (2017), Widiasih dan Gayatri (2017).

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal**

Hasil Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Heliyanto dan Handayani, 2016). Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Wandira (2013), Heliyanto dan Handayani (2016).

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Hasil Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Lewat DAU maka daerah-daerah yang kekurangan modal akan bisa terbantu, sehingga efek dari DAU akan membantu menciptakan kombinasi Input produksi yang lebih optimal. Semakin banyak DAU yang diterima akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan diterima (Purbarini dan Masdjojo, 2015). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Wandira (2013), dan juga dari Widiasih dan Gayatri (2017), Sugiarti dan Supadmi (2014), Heliyanto dan Handayani (2016), Azhar dan Hermanto (2017).

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Hasil Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Alasan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Termasuk salah satu Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Hermanto, 2017). Dengan demikian daerah yang mendapatkan dana alokasi yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Wandira (2013), Arifin (2016) dan Aditiya dan Dirgantari (2017),

### **Pengaruh Pembiayaan Terhadap Belanja Modal**

Hasil Pengaruh Pembiayaan terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diinvestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman. Pinjaman Daerah dapat dijadikan alternatif atas upaya daerah dalam mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan pada Pemerintah Pusat. Pembiayaan daerah merupakan satu hal yang penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin tinggi Pembiayaan maka akan semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari (Sugiarti dan Supadmi, 2017) menyatakan bahwa Pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan Penelitian**

Penelitian ini untuk menguji Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pembiayaan terhadap Belanja Modal pada tahun 2015-2017 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ke lima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap variabel independen (belanja modal) dan parsial, masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel independen.

### **Saran**

Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk menambah variabel terbaru serta diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas dan tahun penelitian yang lebih panjang. Hal ini dimaksudkan hasil penelitian akan menjadi lebih baik dan akan mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai PAD, DBH, DAU, DAK, dan Pembiayaan terhadap belanja modal.

Bagi pemerintah daerah, dengan melihat hasil penelitian diharapkan dapat menggunakan PAD, DBH, DAU, DAK, dan Pembiayaan secara efisien, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja modal secara maksimal. Khususnya pada Dana Alokasi Umum untuk lebih meningkatkan proporsi DAU yang dialokasikan ke belanja modal guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Hartanto dan Rochmatullah. 2016. “ *Determinating The Value Of Capital Expenditure Allocation In Indonesia Local Government*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17 (2), Desember 2016, 152-166, ISSN: 1411-6081.
- Azhar dan Hermanto. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8. ISSN: 2460-0585

- Elsye, Rosmery. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi Akruial Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program Ibm Spss 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Semarang
- Halim, Abdul. 2002. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi Dan pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. Dkk. 2010. Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. 2011. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan daerah. Yogyakarta: Salemba Empat
- Heliyanto dan Handayani.2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal ilmu dan riset akuntansi: Volume 5, Nomor. ISSN: 2460-0585
- Mardiasmo. 2002. Serial otonomi daerah: Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: ANDI
- Purbarini dan Masdjojo. 2015 “ *Flypaper effect tracer on operating expenditure and capital expenditure of city government in indonesia*”. *Sout East Asia Journal Of Contemporary Business Economics Adn Law, Vol 7 , Issue 3 (Aug):* ISSN 2289-15602
- Sugiarthi dan Supadmi. 2014. “Pengaruh PAD, DAU dan SILPA pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495, ISSN: 2302-8556.
- Suhendra, Sulindawati dan Adiputra. 2015. “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bali Periode 2009-2013”. E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015).
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. “ Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal”. *Accounting Analysis Journal 2 (1)*, ISSN: 2252-6765.
- Widiasih dan Gayatri. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada belanjaja modal kabupaten/Kota di provinsi Bali”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret(2017): 2143-2171, ISSN: 2302-8556
- Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010. Tentang Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah sumber : <http://www.jabarprov.go.id/assets/data/menu/BABIVKUA2010.pdf>
- Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten-Kota Di Jawa Tengah Sumber:



<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=keuangan+&yt0=Tampilkan&page=4> diakses 30 desember 2017

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Deskripsi dan analisis APBD TA 2011 Sumber: [http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/deskripsi\\_dan\\_analisis\\_APBD\\_2011\\_a.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/deskripsi_dan_analisis_APBD_2011_a.pdf)

Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat daerah sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367> diakses 30 desember 2017